

Bro 2856
1

untuk
kemenangan
front Nasional
dalam
pemilihan umum

d.n. audit



**Untuk Kemenangan Front
Nasional Dalam Pemilihan Umum
Dan Kewajiban Mengembangkan Kritik Serta
Meninggikan Tingkat Ideologi Partai**



oleh : D.N. Aidit

*(Pidato dimuka sidang Pleno Central Comite ke-III
PKI pada tanggal 7 Agustus 1955)*



INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
- MEI 1997

AMSTERDAM

10778464



(Tjukilan-kaju oleh Ting-ping)

D.N. Aidit

Kawan².

Saat pemilihan umum untuk parlemen jang pertama sudah makin dekat. Ini berarti bahwa kita mendekati saat bersedjarah dalam perdjungan politik bangsa kita. Bukankah hasil pemilihan nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan politik negeri kita? Ia akan sangat mempengaruhi perdjungan Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, untuk menjelamatkan perdamaian, untuk menjelamatkan demokrasi dan untuk memperteguh persatuan semua kekuatan nasional.

Pemilihan umum jang akan datang adalah sangat penting artinja. Djika tidak demikian, tidak akan kaum imperialis membikin „persekutuan sutji” diantara mereka sendiri dan dengan kaum reaksioner didalam negeri untuk menjatuhkan kabinet Ali-Arifin, agar dengan demikian pemilihan umum dapat digagalkan, atau kurang²nja tidak dilaksanakan dibawah Pemerintah Ali-Arifin jang mendapat sokongan Rakjat. Djagang² ranglah, bahwa djatuhnja kabinet Ali-Arifin barisan² bukan se-mata² karena kekuatan kaum reaksioner didalam negeri, tetapi karena permainan politik jang dimainkan dari luar.

Joop Morriën
Amsterdam

Kawan².

Saat pemilihan umum untuk parlemen jang pertama sudah makin dekat. Ini berarti bahwa kita mendekati saat bersedjarah dalam perdjungan politik bangsa kita. Bukankah hasil pemilihan nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan politik negeri kita? Ia akan sangat mempengaruhi perdjungan Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, untuk menjelamatkan perdamaian, untuk menjelamatkan demokrasi dan untuk memperteguh persatuan semua kekuatan nasional.

Pemilihan umum jang akan datang adalah sangat penting artinja. Djika tidak demikian, tidak akan kaum imperialis membikin „persekutuan sutji” diantara mereka sendiri dan dengan kaum reaksioner didalam negeri untuk menjatuhkan kabinet Ali-Arifin, agar dengan demikian pemilihan umum dapat digagalkan, atau sekurang²nja tidak dilangsungkan dibawah Pemerintah Ali-Arifin jang mendapat sokongan Rakjat. Djadi teranglah, bahwa djatuhnja kabinet Ali-Arifin baru² ini bukan se-mata² karena kekuatan kaum reaksioner didalam negeri, tetapi karena permainan politik jang dikemukakan dari luar.

Situasi internasional dimana negeri kita sekarang berada menunjukkan, disatu pihak adanya tanda² yang penting mengenai kemajuan, perjuangannya umat manusia untuk perdamaian dan untuk hidup berdaulat dinegeri masing². Sedjak sesudah sidang Pleno Central Komite ke-II dalam bulan November 1954, kemajuan ini ditandai oleh kejadian² penting seperti antara lain : suksesnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung, diadakannya pernyataan bersama oleh PM Ali Sastroamidjojo dan PM Tjau En-lai, ditandatanganinya perdamaian perdamaian dan pemulihan kedaulatan Austria oleh Empat Besar dan Austria, dinormalkannya hubungan URSS-Jugoslavia, bertambah eratnnya hubungan URSS-India dengan kunjungan PM Nehru ke Moskow, adanya undangan Sovjet Uni kepada Adenauer untuk berkunjungan ke Moskow guna membitjarkan soal mengadakan hubungan diplomatik, ekonomi dan kebudayaan antara Sovjet Uni dan Republik Federal Jerman, berhasilnya Konferensi para kepala Pemerintah Empat Besar di Jenewa baru² ini dan yang terakhir diadakannya perundingan RRT-Amerika Serikat. Disamping itu suksesnya Kongres Perdamaian Dunia di Helsinki dan suksesnya Kongres Ibu Sedunia di Lausanne menambah bukti² tentang kemajuan perjuangannya untuk perdamaian.

Kedjadian² tersebut diatas menunjukkan betapa makin teguhnya kemauan Rakjat diseluruh dunia untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan disemua negeri. Ia djuga menunjukkan betapa benarnya dalil tentang mungkin dan perlunya negara² hidup berdampingan setjara damai dan betapa kesungguhan Sovjet Uni dalam meredakan ketegangan internasional, menormalkan hubungan negara², mentjegah dan membikin tidak mungkinnnya perang atom, dan dalam mentjiptakan keamanan kolektif di Eropa.

Berlangsungnja dan suksesnya Konferensi AA, pernyataan bersama Ali-Tjau, tertjapainja persetudjuaan Indo-

nesia-RRT mengenai soal dwikewarganegaraan, bertambah baiknja hubungan ekonomi dan kebudayaan antara Republik Indonesia dengan negara² Demokrasi Rakjat, hadirnja delegasi² Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional untuk perdamaian, terkumpulnja kira² 3 djuta tandatangan anti-perang atom, semuanya ini menunjukkan bertambah besarnya kekuatan Rakjat Indonesia untuk perdamaian, untuk kemerdekaan nasional dan kedaulatan negerinja.

Difihak lain kita melihat bahwa keinginan baik umat manusia yang djudjur akan perdamaian mendapat tentangan dan perlawanan dari negara² imperialis yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Klik² agresor melakukan segala matjam intrik untuk membendung keinginan damai dan hidup aman umat manusia. Mereka sudah memaksakan dan terus berusaha memaksakan pak² militer yang dikutuk oleh Rakjat diseluruh dunia seperti NATO, SEATO, dsb.

Pemerintah Ali-Arifin, berkat dukungan dan dorongan yang teguh dari Rakjat, telah berhasil mentjegah masuknja Republik Indonesia kedalam SEATO. Tetapi dengan tidak ikutnja Republik Indonesia didalam pak² SEATO, tidak berarti negara² SEATO berdiam diri. Dengan djalan lain konsep SEATO didjalkan di Indonesia. Dengan melalui djalan² subversif, dengan djalan membikin „persekutuan sutji” diantara kaum imperialis dengan kaum reaksioner didalam negeri, negara² SEATO mendjalkan konsepnja di Indonesia, per-tama² ditudjukan untuk mendjatuhkan pemerintahan Ali-Arifin, dan berhasilnja ini dianggapnja sebagai pembuka djalan untuk menarik Indonesia kedalam SEATO. Pembentukan „persekutuan sutji” sematjam ini adalah sedjiwa dengan putusan Konferensi SEATO di Bangkok dalam bulan Februari 1955, dimana atas usul Amerika Serikat terang²an disetudjui rentjana untuk melatih komplotan² spion dari kalangan bangsa² Asia

untuk bekerdja dibawah tanah, sebagai bagian daripada kegiatan spionase Amerika Serikat jang makin meningkat di-negara² Asia.

Akan tetapi, persekutuan jang dibikin negara-negara SEATO di Indonesia, sebagaimana djuga di-tempat² lain, adalah suatu „monsterverbond” („komplotan bandit²”) dimana satu dengan lainnja saling bertentangan karena masing² mempunjai tudjuan hendak menegakkan kekuasaan sendiri². Ini sangat nampak sesudah kabinet Ali-Arifin djatuh! Persekutuan jang tadinja dianggap „sutji” telah berubah mendjadi pertarungan jang sengit untuk kekuasaan sendiri², masing² mau memenangkan djago dan tukangpukulnja. Badan „Kerdjasama Oposisi” (KSO), walaupun sudah mengganti namanja dengan „Kerdjasama Organisasi” (djuga disingkat KSO), tidak dapat mempertahankan keutuhannja, masing² menondjolkkan dirinja sendiri, mengemukakan sikap² politik sendiri², sesuai dengan apa jang diminta oleh madjikanja masing². Pokoknja, disamping mereka membutuhkan „persekutuan sutji” untuk mematahkan kekuatan Rakjat Indonesia, masing² bergulat untuk menempatkan diri pada putjuk pimpinan kekuasaan negara, pos jang terpenting guna melitjinkan djalan buat kepentingan ekonomi sang madjikan.

Tetapi, di Indonesia tidak hanja ada pertarungan antara kekuatan² reaksioner jang dikendalikan oleh negeri² asing. Di Indonesia ada dan terus tumbuh kekuatan elemen jang objektif, jang lahir dari kandungan Rakjat Indonesia sendiri, jaitu kekuatan persatuan Rakjat dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, mentjegah peperangan dan fasisme. Kekuatan ini, tidak akan membiarkan Indonesia djatuh kedalam kekuasaan boneka² negara asing. Berbeda dengan „persekutuan sutji” kaum reaksioner jang petjah ketika sudah sampai waktunja untuk menentukan jang mana akan memegang kekuasaan, kekuatan Rakjat makin erat bersatu dan makin

bulat tekadnja dalam menjelamatkan Indonesia dari bentjana keruntuhan jang besar ini.

Dengan demikian jelaslah, bahwa soal mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan soal memenangkan front nasional dalam pemilihan umum jang akan datang, bukan hanja persoalan PKI menghadapi Masjumi-PSI, tetapi persoalan Rakjat Indonesia seluruhnja, persoalan kekuatan demokratis Indonesia seluruhnja, menghadapi berbagai kekuatan asing dengan boneka²nja, menghadapi kekuatan negara² SEATO dengan partai² dan klik² reaksioner didalamnegeri.

Kenjataan diatas membuktikan betapa objektifnja, betapa ia merupakan keharusan dan kebutuhan, kewadajiban Rakjat Indonesia untuk lebih memperkuat dan memperluas persatuannja. Hanja kekuatan front persatuan dari semua sektor tenaga nasional jang mampu mengalahkan intrik² dan pertjobaan² boneka² asing untuk menempati pos² tertinggi diputjuk pimpinan kekuasaan Republik Indonesia.

Mengapa Front Nasional Harus Menang

Kawan².

Front Nasional berarti kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi, perbaikan nasib dan persatuan daripada Rakjat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut kepentingan bagian terbesar Rakjat Indonesia, adalah satu kebutuhan dan keharusan tertjapainja kemenangan front nasional dalam pemilihan umum nanti. Hanja dengan demikian dapat dipertahankan, diselamatkan dan dikembangkan azas² demokrasi daripada Republik Indonesia. Hanja dengan demikian bendera Revolusi Agustus 1945, sang merah-putih kita, dapat terus berkibar tinggi mendjulang diangkasa. Hanja dengan demikian kita dapat mentjegah dinodainja atau digantinja sang merah-putih dengan bendera lain.

Sebaliknya, kalau bukan front nasional yang menang, maka azas² demokrasi daripada Republik Indonesia akan di-indjak² dan bendera nasional akan dinodai oleh perbuatan elemen² kolonialis, penghasut² perang, elemen² fasis dan tukang² petjahbelah.

Untuk waktu yang sangat lama Rakjat Indonesia tidak akan lupa dengan apa yang sudah terdjadi dibawah kekuasaan reaksioner yang dipelopori Masjumi-PSI sedjak achir tahun 1948 sampai djatuhnja Pemerintah Sukiman tahun 1952. Rakjat Indonesia tidak akan melupakan perang-saudara dan pembunuhan massal dalam tahun 1948, tidak akan melupakan persetudjuan KMB yang chianat, Undang² larangan mogok, penangkapan massal Razzia Agustus 1951, penandatanganan pakt perang MSA, embargo terhadap RRT, meradjalelanja gerombolan DI-TII, pengguntingan wang Rakjat, birokrasi dan korupsi yang tidak kalah hebatnja dari selama kabinet Ali-Arifin, dan banjak lagi. Semuanja harus kita ingatkan kembali karena kita tidak menghendaki terulangnja lagi, walaupun dalam bentuk lain.

Tetapi, berkat persatuan dan kekuatannja, Rakjat Indonesia djuga sudah mempunjai pengalaman yang lain, jaitu ketika awal kekuasaan Pemerintah Wilopo dan selama kekuasaan Pemerintah Ali-Wongso (kemudian Ali-Arifin) yang didukung oleh Rakjat. Selama kekuasaan ini, pada umumnja dan sampai batas² yang tertentu kebebasan demokratis terdjamin, politik perdamaian di-djalankan dengan sungguh², gerombolan DI-TII dinjatakan sebagai musuh Republik dan dibasmi dengan sekuat tenaga, terhadap elemen² subversif dan anti-demokratis diambil tindakan, rentjana Undang² Pembubaran Uni Indonesia-Belanda sudah disiapkan (demikian djuga rentjana Undang² penjelesaian Dwikewarganegaraan, rentjana Undang² Pemerintah Daerah, rentjana Undang² pengganti Undang² larangan mogok Tedjasukmana), tambang minjak Sumatera Utara tetap di-

usahakan Pemerintah, perdjuaan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan sungguh² dalam batas² kemampuan yang ada, dsb. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang bertambah djelek, yang disebabkan oleh persetudjuan KMB, sabotase², birokrasi dan korupsi, Pemerintah Ali-Arifin berusaha memperbesar produksi bahan makanan dan mulai meluaskan hubungan dagang dengan negeri² Demokrasi Rakjat di Eropa dan dengan RRT.

Satu kenjataan yang djuga menggembirakan jalah, bahwa selama pemerintah Ali-Arifin telah berkembang persatuan Rakjat untuk mempertahankan kemerdekaan nasional dan mentjegah peperangan, dalam bentuk Badan² Kerdjasama di-daerah², dalam bentuk Kongres Rakjat Seluruh Indonesia, pengiriman delegasi keluar-negeri untuk perdamaian, untuk persahabatan dan kebudayaan. Ini perlu kita kemukakan untuk mengudji kebenaran politik Partai yang mempertahankan kabinet Ali-Arifin sampai saat yang terachir dan untuk mengerti apa sebabnja politik ini disokong oleh bagian yang terbesar daripada Rakjat.

Kritik yang sering dilantjarkan oleh Partai pada Pemerintah Ali-Arifin jalah berhubung Pemerintah ini kurang tegas dalam berbagai langkahnja, sehingga keadaan² yang djelek dilapangan ekonomi dan keuangan tidak dapat dilikwidasi, sehingga elemen² anti-demokratis, elemen² subversif, tukang² sabot dan koruptor² masih leluasa memainkan rolnja. Kelemahan² pemerintah telah digunakan oleh fihak oposisi untuk membikin Rakjat mendjadi ragu dalam memberikan sokongannja kepada pemerintah dan untuk menarik sebagian dari pimpinan angkatan bersendjata kefihak oposisi. Sudah tentu oposisi dengan sengadja menutup mata mengenai segi² positif dari Pemerintah Ali-Arifin.

Pada pokoknja, kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri telah mengambil keuntungan dari tindakan²

alat² negara di beberapa tempat yang membatasi gerakan Rakjat dan dari tindakan pemerintah yang tidak tegas diberbagai lapangan. Sebaliknya, karena pemerintah dengan tegas menjalankan politik luarnegeri yang maju, pihak oposisi tidak berdaya memukul pemerintah dari jurusan ini. Ini adalah satu pengalaman dan satu pelajaran bagi pemerintah² demokratis di-hari² yang akan datang. Ini adalah pelajaran yang penting bagi Partai kita.

Pemerintah Ali-Arifin telah menjerahkan mandatnya pada tanggal 24 Djuli yang lalu. Pemerintah ini jatuh bukan karena perimbangan suara didalam parlemen, tetapi karena faktor yang berada diluar parlemen, oleh faktor angkatan bersenjata. Ini satu pelajaran bagi kita, bahwa kaum reaksioner didalam keadaan terdjepit dan takut pada perkembangan gerakan Rakjat, dengan tidak merasa kehilangan muka, melemparkan pandji² demokrasi burdjuis. Ini berarti bahwa mereka sudah ber-siap² untuk melangkah dari sistim diktatur burdjuis yang tidak terang²an kesistim diktatur burdjuis yang terang²an, kesistim fasis. Dengan menjalankan sistim ini mereka mau meletakkan beban krisis *seluruhnya* diatas pundak Rakjat, karena sistim ini berarti ditjabutnya hak Rakjat untuk membela diri, untuk menyatakan perasaan, fikiran dan kehendaknya. Mereka sudah tidak mampu untuk kembali berkuasa dengan menggunakan metode² parlementerisme dan demokrasi burdjuis yang lama, dan oleh karena itu mereka melemparkan pandji² demokrasi ini. Ini sangat nampak dari pernyataan² mereka yang menginginkan pemerintah yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen, yang menginginkan pemerintah yang berdiri atas „izin“ bajonet.

Apakah jawab Partai kita dan seluruh kekuatan demokratis dinegeri kita terhadap usaha² kaum reaksioner untuk mendirikan suatu pemerintah yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen? Djawab kita ialah:

PKI, dan bersama dengan PKI seluruh Rakjat pekerdja, hanya menjetudjui pemerintah yang bertanggungjawab kepada parlemen, dan dalam hubungan dengan imbuhan kekuatan yang ada sekarang, mengusahakan terbentuknya pemerintah yang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin.

PKI tidak pernah berkeberatan mengenai penggantian pemerintah, asal gantinya lebih baik. Demikian juga dengan penggantian pemerintah Ali-Arifin. Menurut pengalaman sedjak akhir tahun 1948, pemerintah yang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin tidak mungkin pemerintah yang dipimpin oleh Masjumi-PSI yang anti-demokratis.

Kita mempertahankan sistim demokrasi parlementer, bukan hanya karena sistim politik ini lebih baik daripada sistim diktatur burdjuis yang terang²an, tetapi karena sistim ini juga berhubungan langsung dengan perjuangan massa Rakjat untuk kepentingan se-hari²nja, untuk tuntutanbagian²nja. Dalam hubungan dengan inilah kaum Komunis harus menjelaskan sikap politiknya kepada massa. Tjontoh² sudah tjukup banyak yang membuktikan bahwa massa Rakjat dinegeri kita juga dapat menggunakan parlemen sebagai salahsatu bentuk perjuangannya, untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Bentuk perjuangan ini akan lenjap djika terbentuk pemerintah yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen dan yang tidak menjamin kebebasan demokratis bagi Rakjat.

Dari kenyataan diatas djelaslah apa yang menjadi tugas politik Partai kita yang terdekat pada waktu sekarang. Pertama, mentjegah terbentuknya pemerintah reaksioner dan mengusahakan terbentuknya pemerintah yang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin. Yang kita maksudkan dengan „pemerintah yang lebih baik“ dalam situasi sekarang ialah pemerintah sematjam pemerintah Ali-Arifin dengan komposisi orang² yang lebih

madju dan lebih tjakap, sehingga dapat mendjamin pelaksanaan program jang demokratis dari pemerintah. Kedua, memenangkan front nasional dalam pemilihan umum jang akan datang, sebagai sjarat untuk terbentuknja suatu pemerintah Koalisi Nasional jang didukung dengan teguh oleh seluruh kekuatan demokratis.

Hanja dengan melakukan tugas seperti tersebut diatas, kita dapat menjelamatkan azas demokrasi daripada Republik Indonesia. Inilah tugas untuk mempertahankan kemerdekaan nasional kita, untuk ikut menjelamatkan perdamaian, untuk menjelamatkan demokrasi dan memperteguh persatuan. Tugas ini adalah sesuai dengan Undang² Dasar Republik Indonesia dan sesuai dengan program Partai kita dalam keadaan sekarang.

Sebabnja Kita Mengoreksi Manifes Pemilihan Umum

Kawan².

Pada tanggal 22 Djuni 1955 Politbiro Central Komite setjara mendalam telah mendiskusikan Manifes Pemilihan Umum (MPU) PKI dalam hubungan dengan tugas politik PKI sampai waktu segera sesudah pemilihan umum jang akan datang. Pada tanggal 24 Djuni jang lalu diumumkan resolusi Politbiro Central Komite jang berkepala *„Lewat Pemilihan Umum Jang Akan Datang Membentuk Pemerintah Koalisi Nasional“*.

Dalam resolusi Politbiro tersebut dengan tegas dikatakan, bahwa *„Pemerintah Koalisi Nasional bukan pemerintah diktatur Rakjat“* dan bahwa *„program pemerintah koalisi nasional jang diinginkan oleh PKI bukanlah program Demokrasi Rakjat, tetapi program jang pokoknja sama dengan tuntutan PKI kepada Pemerintah Ali Sastroamidjojo“*.

Berhubung dengan resolusi tersebut mungkin timbul pertanyaan : „Apakah resolusi ini tidak bertentangan dengan putusan Kongres Nasional ke-V ?“, „Apakah dengan ini tidak berarti kita mundur ?“, „Bagaimana slogan² kita untuk pemilihan umum ?“, dan „Bagaimana kedudukan MPU jang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V ?“.

Sebagaimana kita ketahui, Kongres Nasional ke-V Partai bulan Maret 1954 telah melahirkan sedjumlah dokumen², antara lain MPU. Sesudah Kongres Nasional ke-V semua aktivitet Partai didasarkan atas putusan² Kongres tersebut. Putusan Kongres Nasional ke-V telah mentjepatkan perkembangan Partai. Ini nampak dari pe-luasan anggota dan organisasi Partai, dan dari meningkatnja pengaruh dan prestise politik Partai.

Berhubung dengan pertanyaan *„Apakah resolusi ini tidak bertentangan dengan putusan Kongres Nasional ke-V ?“*, maka djawabnja ialah : Ja dan tidak. Resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni 1955 bisa dianggap bertentangan dalam arti bertentangan dengan MPU, jang djuga diputuskan oleh Kongres. Tetapi ia tidak bertentangan, malahan sesuai dengan putusan Kongres, dalam arti sesuai dengan Program PKI, jaitu dokumen utama jang djuga disahkan oleh Kongres.

Apakah buktinja bahwa Resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni jang lalu sesuai dengan Program PKI ? Buktinja ialah, bahwa dalam Program PKI dengan djelas dikatakan bahwa :

„Pemerintah Demokrasi Rakjat akan merupakan suatu pemerintah jang samasekali baru djika dibandingkan dengan semua pemerintah² jang ada sebelumnya“, dan bahwa „Djalan keluar terletak dalam mengubah im-bangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakjat difihak jang lain. Djalan keluar terletak dalam membang-

kitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani".

Selanjutnya dikatakan bahwa „Hanja satu front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat yang se-luasⁿja dan perdjuaan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat Indonesia mendirikan suatu pemerintah Demokrasi Rakjat yang akan mendjalankan program Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menuju kemenangan".

Djadi jelaslah apa yang menjadi sjarat² pemerintah Demokrasi Rakjat, dan sjarat² itu masih harus kita tjiptakan.

Mengenai perdjuaan parlementer dikatakan dalam Program PKI, bahwa :

„Sedjarah perdjuaan pembebasan nasional Rakjat Indonesia, sebagaimana djuga sedjarah perdjuaan Rakjat, negeri² lain, menunjukkan bahwa perdjuaan parlementer sadja tidaklah tjukup untuk mentjapai tudjuan membentuk sesuatu pemerintah Demokrasi Rakjat", dan dikatakan djuga bahwa „PKI memandang pekerdjaan dalam parlemen bukan sebagai pekerdjaan Partai yang pokok dan tidak memandang perdjuaan parlementer sebagai satuⁿja bentuk perdjuaan", walaupun „PKI telah ambil bagian dan terus akan ambil bagian yang paling aktif dalam perdjuaan parlementer".

Djadi jelaslah, bahwa resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni yang lalu tidak menjalahi putusan Kongres, tetapi sebaliknya, untuk mengoreksi MPU yang menjalahi Program Partai.

Saja kira, ada kawan² kita yang bertanja : Apakah tidak perlu dibawa kekongres dulu, karena MPU adalah putusan Kongres ? Bahwa soal ini harus dikemukakan

kepada kongres jad., sudah pasti. Tetapi adalah tidak benar kalau sesuatu putusan kongres yang menurut teori dan menurut kenyataan se-hari² adalah salah, dan apalagi terang bertentangan dengan Program Partai, akan dibiarkan oleh pimpinan Partai dalam waktu yang lama, sampai Kongres yang akan datang.

Berhubung dengan pertanyaan „Apakah dengan ini tidak berarti kita mundur ?", maka djawabnja ialah : bahwa disini tidak ada persoalan mundur, tetapi soalnya ialah mengoreksi kesalahan, dan tiap² pekerdjaan mengoreksi kesalahan berarti kemajuan. Ja, tetapi apakah dengan koreksi ini kita tidak mundur dari djandji yang sudah kita berikan kepada Rakjat berdasarkan MPU. Memang, Pemerintah Demokrasi Rakjat adalah lebih mendjamin kepentingan Rakjat daripada pemerintah Koalisi Nasional. Tetapi, dalam menghadapi pemilihan umum kita harus mengemukakan program yang memang mungkin dilaksanakan segera sesudah pemilihan umum, dengan tidak menghentikan propaganda kita, bahwa tudjuan kita adalah lebih djauh dari itu. Kewadajiban kita ialah, disamping menerangkan persamaan program kita dengan program Pemerintah Koalisi Nasional, djuga menerangkan perbedaannya, jaitu bahwa program Partai adalah lebih mendjamin kepentingan Rakjat banjak.

Berhubung dengan pertanyaan „Bagaimana slogan² kita untuk pemilihan umum ?", maka djawabnja ialah : bahwa slogan² kita untuk pemilihan umum yang akan datang harus kita sesuaikan dengan program untuk pemerintah Koalisi Nasional. Dengan demikian slogan² pemilihan umum kita adalah slogan² aksi yang kongkrit. Oleh karena itu slogan² ini akan merupakan kekuatan dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa disekeliling Partai.

Berhubung dengan pertanyaan : „Bagaimana kedudukan MPU yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-V ?", maka djawabnja ialah : bahwa dengan keluarnya

resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni jang lalu dokumen tersebut tidak berlaku lagi sebagai Manifes untuk Pemilihan Umum jang akan datang. Tetapi apakah dengan demikian berarti MPU samasekali tidak berguna untuk keperluan lain ? Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menerangkan sistim Demokrasi Rakjat kepada anggota² baru, karena ia ditulis lebih populer dan bersifat polemis.

Demikianlah djawaban pada pertanyaan² jang banjak timbul ketika comite² dan fraksi² mendiskusikan Resolusi Politbiro tanggal 24 Djuni 1955.

Selain daripada itu, penting untuk dikemukakan disini, bahwa kalau kita mempeladjar putusan² sidang Pleno Central Comite ke-II jang dilangsungkan dalam bulan November 1954, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa putusan² sidang Pleno tersebut tidak didjiwai oleh MPU, tetapi didjiwai oleh Program PKI, dokumen jang terpenting jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V. Ini menundjukkan, bahwa sebenarnja Partai kita sudah agak lama *merasakan* adanya putusan Kongres jang „sumbang“, tetapi hal ini tidak segera didiskusikan, diformulasi dan didjadikan putusan.

Bahwa sidang Pleno CC ke-II tidak didjiwai oleh MPU nampak dari apa jang antara lain dimuat dalam laporan sbb. : „Kerdjasama antara Partai dan massa Komunis dengan partai² dan massa Nasionalis dan Islam bagi kita bukan hanja sesuatu jang dapat dibatasi sampai selesainja pemilihan umum jang akan datang, sebagaimana sering dikatakan oleh pemimpin² Nasionalis dan Islam. Kita menghendaki kerdjasama djuga sampai sesudah pemilihan umum, dengan tidak perduli siapa jang akan menang nanti. Dan apa jang kita inginkan ini adalah sesuai dengan sembojan Republik kita 'Bhinneka Tunggal Ika' (berbeda tetapi satu)“.

Dalam kita menjatakan kehendak kita bekerdjasama dengan „partai² dan massa Nasionalis dan Islam“, djuga

sampai sesudah pemilihan umum, dapat kita gambarkan partai² mana jang kita maksudkan itu.

Djadi sekarang djelaslah apa sebabnja kita harus mengoreksi MPU. Tindakan Politbiro CC dengan resolusi tanggal 24 Djuni tersebut telah membikin salahsatu putusan Kongres Nasional ke-V jang tidak objektif mendjadi objektif. Karena objektifnja, ia pasti akan lebih memadjukan pekerdjaan Partai. Disamping akan sangat membantu pekerdjaan Partai dalam mempersatukan semua kekuatan nasional, resolusi tersebut djuga telah menimbulkan aktivitet jang besar dikalangan kader² Partai dalam mendiskusikan teori revolusi ditanah djadjahan dan setengah-djadjahan. Oleh karena itu, resolusi Politbiro tersebut samasekali tidak melemahkan Partai, tetapi sebaliknja. Disamping akan memperkuat front persatuan, pelaksanaan dan diskusi² mengenai resolusi tersebut akan menambah pengertian Partai tentang Revolusi Indonesia, akan memperkuat ideologi Partai dan meninggikan prestise pimpinan Partai dimata anggota² dan dimata Rakjat.

Ada beberapa gelintir trotskis jang mengatakan : „Lihat orang² PKI itu, tidak pernah berhenti membikin kesalahan, sekarang sudah mengoreksi diri lagi !“ Mereka tidak sedar, bahwa dengan utjapan ini sama sadja dengan mereka mengatakan, bahwa kaum Komunis tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Memang, kita kaum Komunis tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti memperbaiki diri, karena kita ingin dari baik mendjadi lebih baik. Dan untuk ini sjaratnja jalah mengamalkan kritik dan selfkritik. Ini salahsatu perbedaan jang penting antara kaum Komunis dan kaum trotskis.

Melipatgandakan Aktivitet Disemua Lapangan Pekerdjaan Partai

Kawan².

Sebagaimana sudah dikatakan diatas, untuk memenangkan front nasional dalam pemilihan umum jang akan datang, kewadajiban kita jang pertama-tama dan jang terpenting ialah : mentjegah terbentuknja pemerintah jang reaksioner.

Kewadajiban mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner adalah satu dan tidak bisa dipisahkan dari kewadajiban memenangkan front nasional dalam pemilihan umum jang akan datang. Kemenangan front nasional akan lebih terdjamin djika pemilihan umum dilangsungkan dibawah pemerintah jang tidak reaksioner. Pemerintah reaksioner tidak hanya akan berusaha menunda pemilihan umum, tidak hanya akan merombak panitia² pemilihan jang sudah tersusun setjara demokratis, tetapi akan membikin segala matjam perbuatan anti-demokratis untuk mengalahkan blok demokratis.

Kelirulah djika orang mengira bahwa terbentuknja pemerintah reaksioner hanya akan merugikan PKI, dan tidak akan merugikan partai² Nasionalis, partai² Islam dan partai² lain jang mempertahankan azas² demokrasi. Pemerintah reaksioner memang menudjukan pukulannja jang pokok kepada benteng demokrasi jang paling mereka takuti, jaitu PKI. Tetapi ini hanya permulaan untuk menghantjurkan benteng² demokrasi jang lain. Dari kenyataan ini djelaslah, betapa objektifnja dan masuk akalnja djika seluruh kekuatan demokratis aktif mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan aktif mengusahakan terbentuknja pemerintah jang lebih baik daripada pemerintah Ali-Arifin, lebih baik dalam komposisi orang²nja dan lebih tegas dalam melaksanakan program²nja jang maju.

Pekerdjaan mentjegah terbentuknja pemerintah reaksioner dan pekerdjaan memenangkan front nasional dalam pemilihan umum hanya mungkin djika Partai melipatgandakan aktivitetnja disegala lapangan, dilapangan mengorganisasi dan memobilisasi massa, dilapangan memperkuat organisasi dan ideologi Partai. Pasivitet adalah makanan jang empuk bagi fasisme. Fasisme harus ditjegah dan dilawan dengan melipatgandakan aktivitet, melipatgandakan keberanian dan kewaspadaan.

Dalam keadaan jang bagaimanapun, kita harus berpendirian, bahwa faktor jang menentukan dalam menetapkan haridepan kita setjara tepat, ialah pekerdjaan kita untuk mengajak massa Rakjat menjokong program mempertahankan kemerdekaan nasional, demokrasi, perdamaian dan perbaikan nasib se-hari². Jang bisa menarik massa kedalam perdjuaan ini, sebagai sjarat untuk meyakinkan massa akan kebenaran program ini, ialah aksi² daripada massa sendiri. Untuk ini kita harus merumuskan setjara presis dan mewujudkan tuntutan² kongkrit jang tertentu serta melaksanakan aksi² dimana massa jang luas mempunyai kepentingan dan memberikan sokongannja.

Di-tengah² keadaan dimana kaum reaksioner terus menerus dalam rapat², koran², brosur², dsb. mengusahakan supaya Rakjat mendjadi atjuh tak-atjuh terhadap persatuan, dimana kaum reaksioner meng-edjek² tiap² usaha untuk persatuan, adalah kewadajiban kita untuk menundukkan dan meyakinkan Rakjat bahwa persatuan adalah mungkin dan dapat diadakan. Dalam keadaan seperti ini adalah penting untuk mengemukakan tjontoh² daripada persatuan jang pernah ada dalam sedjarah perdjuaan Rakjat Indonesia dan tjontoh² se-hari² jang membuktikan bahwa persatuan perlu, mungkin dan dapat diadakan untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan, tanpa mengenal perbedaan agama, kejakinan politik, sukubangsa dan kedudukan sosial.

Kita harus menundukkan kepada Rakjat wujud persatuan yang sudah kita punjai, yaitu organisasi² massa yang besar dan kerdjasama dulu dan sekarang antara Partai kita dengan partai² Nasionalis, Islam dll. partai yang demokratis. Kita harus resapkan didalam hati dan fikiran Rakjat, bahwa tidak benar dan berbahaya sekali apa yang sering diutjapkan oleh pemimpin² Masjumi-PSI, yang mengatakan bahwa Rakjat tidak bisa bersatu karena perbedaan agama, ideologi, politik, sukubangsa dan kedudukan sosial. Djustru karena adanya perbedaan inilah maka timbul problem bagaimana mempersatukan Rakjat, dan timbulnya problem ini ialah karena kejakinan bahwa soal persatuan adalah soal kebutuhan dan keharusan yang objektif.

Bagi kita kaum Komunis, persatuan bukanlah hanya setjarik kertas atau omong² tentang tudjuan² yang bagus². Bagi kita persatuan adalah kebutuhan, adalah metode kerdja dan metode perdjungan. Kita yakin, bahwa yang terpenting dan yang menentukan untuk tertijptanya persatuan ialah keharusan daripada persatuan untuk melipatgandakan kekuatan dan kemampuan massa guna bertahan terhadap lawan dan mengalahkan lawan.

Terlalu banyak titik² pertemuan yang dapat mempersatukan massa seperti : upah yang terlalu rendah, perlakuan madjikan yang se-wenang², bunga wang yang tinggi, sewa tanah yang mendjerat leher, kenaikan harga barang, antjaman mati konjol karena peperangan, antjaman gerombolan teroris, pengekangan hak² demokrasi, peraturan² pemerintah pusat atau daerah yang merugikan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan titik² pertemuan inilah kita menggalang persatuan daripada massa.

Sendjata kaum reaksioner yang sekarang paling banyak digunakan untuk memetjah-belah persatuan nasional ialah agama, se-olah² kaum Komunis ada didunia dengan tudjuan untuk merusak agama dan mengganggu kebebasan beragama. Sesungguhnya tjara memfitnah

sematjam ini hanya meneruskan tjara yang dulu dipakai oleh kaum kolonialis Belanda dan kaum fasis Djepang, sehingga bagi Rakjat mudah mengetahui dari mana dan kemana angin bertiup. Akan tetapi, karena kita belum mempunyai kesempatan dan waktu yang tjukup untuk membikin fitnahan ini menjadi tidak berdjaja, maka adalah keliru sekali kalau kita sekarang menganggap „sepi“ fitnahan sematjam itu. Oleh karena itu, kita harus meneruskan dan melipatgandakan kegiatan kita dalam mendjawab dan membuktikan dengan perbuatan kita sehari², bahwa kaum Komunis tidak berdjjuang melawan agama, bahwa program kita untuk kemerdekaan, perdamaian, demokrasi dan perbaikan nasib sehari² tidak berarti tantangan terhadap agama manapun.

Kita harus memakukan didalam kesedaran massa, bahwa bukan agama, tetapi pandji² „anti Komunisme“ yang dikibarkan oleh Masjumi-PSI, inilah yang menjebakkan kita dengan sekuat tenaga melawan politik antidemokratis daripada partai² ini. Kita lakukan ini karena kita tahu bahwa politik „anti Komunisme“ Masjumi-PSI adalah perintang yang paling besar dalam usaha menggalang persatuan dikalangan Rakjat, bahwa politik ini sesungguhnya ditudjukan untuk membendung dan mematahkan seluruh kekuatan patriotik dan demokratis.

Kedjadian² dibanyak negeri, dan djuga pengalaman di negeri kita, membuktikan bahwa tidak pernah politik „anti Komunisme“ dihentikan sesudah Partai Komunis dilarang dan pemimpin²nja dimasukkan kedalam pendjara atau dibunuh. Politik ini pasti diikuti oleh politik menghantjurkan kekuatan patriotik dan demokratis lainnya. Patriot² dan demokrat² non-Komunis yang djudjur ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah „Komunis“. Bukankah pedjuang² kemerdekaan Indonesia yang non-Komunis dizaman pendjadjahan Belanda ditangkap dan diasingkan karena mereka dituduh „Komunis“? Kenjataan² ini tidak hanya menundukkan tem-

pat jang terhormat bagi kaum Komunis dalam melawan kolonialisme, tetapi djuga menunjukkan bahwa politik „anti Komunisme” dari Masjumi-PSI atau dari manapun, tidak bisa berakibat lain ketjuali mentjiptakan sjarat untuk timbulnja front demokratis. Tinggal tergantung pada Partai kita sampai kemana kemampuan mendjelaskan kebenaran sedjarah dan kebenaran jang aktuיל ini kepada massa dan kepada pemimpin² partai² demokratis, sebagai sjarat untuk membangkitkan kekuatan demokratis tersebut.

Sendjata kaum reaksioner jang djuga banjak digunakan untuk memetjahbelah persatuan nasional jalah fitnahan, se-olah² PKI bukan elemen nasional, se-olah² segala gerakgerik PKI adalah dikendalikan dari luarnege-ri, dari „Peking” dan dari „Moskow”. Padahal, kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri tahu benar, bahwa PKI erat hubungannja dengan massa Rakjat, djadi bahwa PKI adalah kekuatan nasional jang terpenting. Djustru karena mereka mengetahui ini, maka mereka berkepentingan untuk memisahkan PKI dari kekuatan nasional lainnja, agar dengan demikian kekuatan nasional mendjadi takberdaja. Fitnahan jang bertudjuan memetjahbelah ini harus kita lawan dengan djalan membuktikan kepada Rakjat, bahwa PKI adalah elemen jang objektif daripada situasi negeri kita sendiri. Kita harus buktikan ini dengan keterangan² kita jang masuk akal dan dengan perbuatan kita se-hari².

Kebebebaran garis politik, aktivitas se-hari² dan pimpinan Partai kita kepada massa, akan membuktikan bahwa djustru tukang² fitnah itulah jang sebenarnja mewakili kepentingan negeri² asing di Indonesia. Akan mendjadi terang bagi Rakjat bahwa „Moskow” (Sovjet Uni) dan „Peking” (RRT) tidak mempunjai kepentingan untuk menaham „agen” atau „komprador” di Indonesia, karena kedua negeri ini tidak mempunjai kepentingan untuk menguasai ekonomi negeri² lain, djuga ti-

dak mempunjai kepentingan untuk menguasai ekonomi Indonesia. Tetapi kaum imperialis Belanda, Amerika, Inggris dll. jang mempunjai banjak tanaman-modal di Indonesia, jang tidak pernah diserang oleh tukang² fitnah, djustru merekalah jang mempunjai kepentingan untuk menanamkan agen² atau komprador²nja di Indonesia. Kewadajiban terpenting dari agen² atau komprador² ini jalah memetjahbelah potensi nasional Rakjat Indonesia. Dari kenjataan² ini dan dari pengalaman²nja sendiri, massa akan menarik kesimpulan bahwa tuduhan „agen luarnege-ri” kepada kaum Komunis sebenarnja hanya untuk menutupi perbuatan tukang² fitnah itu sendiri.

Sekali lagi, kewadajiban kita jalah, memakukan kesedaran pada massa, bahwa PKI adalah elemen jang objektif daripada situasi negeri kita sendiri. Pekerdjaan ini akan sangat dibantu oleh kenjataan, bahwa sedjarah perdjjuangan Partai kita adalah sedjarah jang heroik dan patriotik.

Pekerdjaan melipatgandakan aktivitas dilapangan mengorganisasi dan memobilisasi massa tidak mungkin kita lakukan dengan baik, djika bersamaan dengan itu kita lengah memperkuat organisasi dan ideologi Partai. Tugas² mengenai ini sudah dirumuskan dengan djelas dalam putusan² jang diambil dalam Kongres Nasional ke-V dan dalam sidang Pleno Central Komite ke-II. Dalam kesempatan ini saja hanya hendak menekankan beberapa soal.

Mengenai organisasi. Sesudah kita dengan sukses meluaskan keanggotaan dan organisasi Partai, jang terpenting jalah membikin tiap² anggota dan organisasi kita mendjadi elemen jang aktif dalam mendjalankan putusan² Partai. Untuk ini jang terpokok jalah melaksanakan tjarakerdja kolektif didalam semua Komite, fraksi dan grup Partai. Lebih² soal mengaktifkan grup² Partai harus mendapat perhatian dan pimpinan istimewa. Sa-

ngat tergantung pada soal mengaktifkan grup² inilah, akan terdjawab pertanjaan, apakah Partai kita dari suatu gerakan jang sudah besar sekarang akan mendjadi organisasi jang besar, akan mendjadi Partai jang besar, dimana tiap² anggota dan tiap² organisasi Partai adalah elemen jang aktif dalam mendjalankan politik dan putusan² lainnja daripada Partai. Inilah sjarat untuk mendjadi Partai kita tulangpunggung gerakan Rakjat sampai ke-basis² organisasi² massa.

Dalam sidang Pleno Central Comite ke-II kita menekankan tentang pentingnja tjarakerdja kolektif. Pengalaman kita menundjukkan bahwa tjarakerdja kolektif baru besar artinja djika disertai oleh diskusi² jang kritis. Sjarat untuk dari baik mendjadi lebih baik, sebagai sudah dikatakan diatas, jalah mengamalkan kritik dan selfkritik. Untuk perkembangan Partai daripada klas buruh dan untuk perkembangan gerakan Rakjat, kritik adalah satu keharusan. Kita harus mengutjapkan „selamat datang” pada tiap² kritik. Oleh karena itu kita harus mendjalankan saling kritik. Ini tidak hanja bukti bahwa kita kuat, tetapi djuga bukti bahwa kita ingin mendjadi lebih kuat, karena oleh kritik kita mendjadi lebih mampu untuk bekerdja dan berdjuaug. Dengan mengamalkan kritik dan selfkritik didalam Partai keper-tjajaan Rakjat kepada kita akan mendjadi lebih besar, karena mengetahui bahwa dalam pimpinan Partai duduk orang² jang mempunyai kesungguhan, jang dengan sung-guh² mempeladjar semua persoalan dan mentjarikan pe-metjahannja dilihat dari sudut keharusan dan kewadajib-an jang dihadapi oleh seluruh Rakjat.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan² Partai jang masih besar dalam membantu perdjuaugan kaum tani untuk kebutuhan se-hari², untuk mendapatkan tuntutanbagian² mereka. Demikian djuga mengenai pe-kerdjaan Partai dikalangan kaum buruh, kaum inteli-gensia dan klas² serta golongan² lain daripada Rakjat.

Pekerdjaan Partai untuk perdamaian dan untuk mem-pertahankan kebebasan demokratis daripada Rakjat ma-sih banjak kekurangan²nja. Dalam menggalang kerdja-sama dengan partai² dan organisasi² lain, kader² kita masih sering menundjukkan kekakuan, disamping mere-ka jang suka „kehilangan diri sendiri”.

Masih sering kita melihat, bahwa kader² Partai mela-kukan pekerdjaannja sebagai mesin, tidak dengan sepe-nuh djiwa dan tidak dengan gairat (elan). Bekerdja se-bagai mesin, tidak dengan sepenuh djiwa dan tidak de-ngan gairat tidak bisa berakibat lain ketjuali akan mem-bawa semangat birokrasi didalam kantor² Partai dan kantor² organisasi massa serta dalam tjara bekerdja fungsionaris² Partai. Bekerdja demikian tidak mungkin produktif dan kader jang demikian tidak mungkin kreatif.

Kita harus tjakap menemukan tiap² kesalahan dan ke-kurangan kita, menerangkannja dengan djelas dan me-ngoreksinja. Ini kita lakukan dalam badan² kolektif di-mana kita mengadakan diskusi² jang kritis. Tetapi, ini sadja tentu tidak tjukup. Untuk menemukan kesalahan² dan kekurangan², kita harus mempunyai pengetahuan teori dan ketjakapan politik serta organisasi jang luas. Ini hanja mungkin djika kita menguasai Marxisme-Leninisme dan mengetahui bagaimana seharusnya kita bekerdja. Ini terutama bagi kader² jang memegang pim-pinan Partai. Kita harus lebih banjak membatja, bela-djar dan berdiskusi. Untuk ini sudah ada harian Partai, brosur² dan penerbitan² lain daripada Partai.

Kita menentang dogmatisme. Oleh karena itu, tiap² pendirian politik dan hasil pekerdjaan Partai harus di-diskusikan setjara mendalam dan setjara kolektif. Semua Komunis harus melakukan ini, semua bisa dan semua ha-rus ambil bagian dalam diskusi² mengenai putusan Par-tai, mengenai pelaksanaan putusan dan mengenai hasil daripada pekerdjaan. Inilah sjarat mutlak supaja Partai

senantiasa aktif, senantiasa mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang dilakukannya, dan karenanya mampu menunaikan tugas² yang dihadapkannya padanya.

Diskusi² mengenai kritik terhadap MPU adalah tjon-toh yang hidup bahwa diskusi² yang kritis membikin Partai lebih bersatu dan lebih kuat, karena dalam diskusi² ini telah dipadukan pengalaman² praktis kita dengan teori² kita yang ditulis didalam buku² klasik kita. Dari diskusi² ini kita rasakan benar bahwa dasar yang menentukan mengenai persatuan didalam Partai ialah kejernihan dalam ideologi, pengertian tentang dasar² pokok ajaran kita, yang menjadi sumber garis politik dan yang menentukan arah pekerjaan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa pekerjaan kita untuk memenangkan front persatuan dalam pemilihan umum dan untuk melaksanakan putusan² yang lain daripada Partai, hanya mungkin jika kita tidak henti²-nja mengembangkan kritik dan meninggikan tingkat ideologi daripada Partai. Inilah pula yang harus menjadi pegangan kita, dalam keadaan yang bagaimanapun Partai berada. Inilah syarat untuk memperkuat disiplin Partai, untuk menanamkan solidaritet Komunis yang mesra didalam Partai dalam keadaan biasa, apalagi didalam keadaan yang se-sukar²nja bagi Partai dan bagi massa.

Kawan².

Sebagai penguntji uraian ini dan sebagai kesimpulan mengenai kewadajiban² Partai yang terpenting pada waktu² dekat yang akan datang, mari kita serukan :

Tjegah terbentuknja pemerintah yang reaksioner !

Menangkan front nasional dalam pemilihan umum yang akan datang !

Kembangkan kritik dan tinggikan tingkat ideologi daripada Partai !

Isinja diluar tanggungan Pertj. Seno N.V.

Rp. 1.50